

**EFEKTIVITAS PESAN FRAMING PROGRAM MBG DALAM MEMPENGARUHI
PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

Annisa Adilla¹, Afisa², Rizky Rahmanda Irawan³

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Selamat Sri Batang

Email Korespondensi: annisaadilla@upstegal.ac.id

ABSTRACT

This article examines how the effectiveness of online media framing related to the Free Nutritious Food Program (MBG) influences public perception and participation. The background of this article is based on the contrast in media narratives, starting from appreciating the social and economic impacts to criticizing the risks of poisoning and increased spending that could split public opinion. Using a descriptive qualitative approach, four articles from pro (detik.News) and contra (ugm.ac.id and dpr.go.id) sources were analyzed using Robert N. Entman's Framing theory. The analysis tool includes defining the problem, identifying the causes, making a moral decision, and suggesting a treatment plan. Data was collected through documentary studies and then processed using narrative categorization, comparison, and source triangulation to ensure data validity. Research results show that pro-government media portrays MBG as a real solution that strengthens the government's legitimacy, thus encouraging public participation that is mostly passive and consumer-like. On the other hand, the opposing media focuses on the operational risks and budget issues, leading the public to closely watch and criticize. This study concludes that the effectiveness of MBG framing depends on the balance between appreciative and critical narratives to encourage active participation and ensure program accountability.

Keywords: Framing, Free Nutritious Meals Program, Public Perception, Community Participation.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis efektivitas framing media daring terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam memengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat. Latar belakang dalam artikel ini memicu pada kontransnya narasi media, mulai dari apresiasi dampak sosial-ekonomi hingga kritik atas risiko keracunan dan lonjakan anggaran yang berpotensi membelah opini publik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif empat artikel dari media pro (detik.News) dan kontra (ugm.ac.id serta dpr.go.id) dianalisis menggunakan teori framing Robert N. Entman. Perangkat analisis mencakup define problem, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, lalu diolah via kategorisasi narasi, komparasi, serta triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pro membingkai MBG sebagai solusi nyata yang menguatkan legitimasi pemerintah, sehingga memicu partisipasi publik yang cenderung pasif-konsumtif. Sebaliknya, media kontra menyoroti risiko operasional dan anggaran yang mengarahkan masyarakat pada pengawasan kritis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas framing MBG sangat bergantung pada keseimbangan antara narasi apresiatif dan kritis guna mendorong partisipasi aktif serta menajadn admin akuntabilitas program.

Kata kunci: Framing, Program Makan Bergizi Gratis, Persepsi Publik, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Masalah gizi kronis (terutama stunting) telah lama menjadi isu pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Stunting didefinisikan sebagai kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

448

Indexed

SINTA 4



PKP|INDEX



periode waktu yang lama. Kondisi tersebut memicu pada kegagalan tumbuh yang diakibatkan oleh kombinasi asupan gizi yang tidak memadai, infeksi yang terjadi berulang, serta lingkungan yang kurang mendukung. Dampak stunting bersifat permanen menyebabkan terhambatnya perkembangan fisik dan kognitif optimal anak yang selanjutnya akan memengaruhi kualitas hidupnya di masa yang akan datang (Astuti, 2019). Pemerintah Indonesia telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas nasional, menargetkan angka penurunan yang ambisius. Meskipun secara umum terjadi tren penurunan, masalah gizi masih sering diperarah oleh tantangan gizi ganda (double burden of malnutrition), di mana kekurangan gizi berdampingan dengan peningkatan kasus gizi lebih (obesitas), menunjukkan kompleksitas masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu, Program Makanan Bergizi (MBG) diimplementasikan sebagai langkah strategis Pemerintah untuk mereduksi beban gizi ganda tersebut.

Program Makanan Bergizi diinisiasi sebagai intervensi strategis dan massif untuk memastikan kecukupan asupan gizi harian bagi kelompok rentan, termasuk balita; ibu hamil; ibu menyusui; dan anak-anak sekolah. Program ini tidak hanya dilihat sebagai bantuan makanan, tetapi sebagai investasi social yang bertujuan memutus rantai kekurangan gizi sejak dini. Keberhasilan program ini telah tercermin dalam capaian nasional. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional berhasil turun menjadi 19,8 persen, sebuah capaian signifikan yang melampaui target tahunan. Namun demikian, keberhasilan intervensi ini harus terus didorong mengingat target penurunan yang lebih ketat di tahun-tahun yang mendatang (Muhawarman, 2025). Meskipun kemajuan telah dicapai di tingkat nasional, implementasi MBG di Lapangan seringkali terbentur oleh masalah non-teknis terutama di tingkat komunitas. Tantangan logistic ketersediaan sumber daya manusia dan inkonsistensi pelaksanaan menjadi penghalang. Namun, salah satu factor yang paling menentukan adalah aspek sosio-kultural yaitu perilaku, persepsi, dan tingkat partisipasi masyarakat sasaran. Seringkali, program pemerintah seperti MBG dilihat hanya sebagai kewajiban yang diberikan, bukan sebagai program bersama yang menuntut sense of ownership dari warga.

Menurut data detikNews merilis berita yang berjudul, “Terbantu Program MBG, Ortu Siswa Berterima Kasih ke Polda Riau.” menjelaskan bahwa kehadiran Program Makanan Bergizi (MBG) yang diselenggarakan oleh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Riau di Pekanbaru mendapat sambutan positif dan dirasakan manfaatnya secara langsung masyarakat. Salah satu warga di sana yaitu Alfasusri seorang pedagang es, mengungkapkan bahwa program MBG sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga khususnya dalam penyediaan bekal bergizi untuk ketiga anaknya yang bersekolah di SD. Dengan adanya makanan gratis yang disajikan oleh SPPG, biaya yang sebelumnya dialokasikan untuk bekal harian kini dapat dialihkan untuk keperluan pendidikan anak, sehingga turut mendukung keberlangsungan sekolah. Melalui pengakuan Alfasusri, menyatakan bahwa dia memiliki dukungan dan antusiasme tinggi terhadap menu bergizi yang disajikan serta berharap program ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Secara total, Dapur SPPG Polda Riau 2 meresmikan distribusi MBG kepada 3129 siswa di enam sekolah di Kecamatan Sail, Kota Baru (Mei, 2025).

Menurut data detikNews merilis berita yang berjudul, “Survei ISS: 77% Masyarakat Nilai Program MBG Bermanfaat.” bahwa Survei Indonesian Social Survey (ISS) yang dilakukan pada 11-20 Juli 2025 terhadap 2200 responden nasional menunjukkan dukungan kuat publik terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 77% responden menilai program MBG sangat bermanfaat atau bermanfaat bagi penerimaan. Selain itu, MBG tercatat sebagai program pemerintah yang paling diingat publik, mengungguli program-program lain (58% responden menilai program ini sesuai). Program ini tidak hanya dilihat sebagai bantuan makanan semata, tetapi juga sebagai simbol kuat kehadiran Negara yang memberikan rasa tenang terkait gizi anak sekolah. Tingginya asosiasi ini tercermin dari fakta bahwa 65,8% responden menganggap Presiden Prabowo Subianto sebagai penyelenggara program bukan Badan Gizi Nasional. Untuk menjaga efektivitasnya, Direktur Penelitian ISS menyarankan agar program ini dilaksanakan secara konsisten, menjaga kualitas makanan, dan dihubungkan dengan kebijakan lain yang mendukung ekonomi keluarga (Komara, 2025).

Berdasarkan dari kedua berita tersebut dapat diasumsikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki adanya keberhasilan yang terkonvergensi, baik dari sisi fungsional di Lapangan maupun dari sisi persepsi publik secara nasional. Implementasi MBG di tingkat lokal seperti yang dilakukan oleh Dapur SPPG Polda Riau secara nyata memberikan dampak ekonomi positif bagi keluarga penerima yang mengalihkan dana bekal harian anak untuk keperluan pendidikan, sekaligus mengingatkan atusisisme terhadap gizi. Persentase responden menilai program ini bermanfaat menjadikan program yang paling diingat dan didukung publik. Oleh karena itu, MBG yang mengatasi permasalahan serius dalam malnutrisi dan stunting di Indonesia, khususnya pada kelompok rentan seperti balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini diimplementasikan untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi harian kelompok sasaran tersebut terpenuhi dengan optimal sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) (Bpmpprovsumut.kemendikdasmen.go.id, 2025). Tujuannya bukan hanya memberi makanan, tetapi memastikan bahwa mereka mendapatkan gizi yang cukup setiap hari. Dengan begitu, diharapkan masalah gizi bisa dicegah sejak dini dan kualitas generasi ke depan menjadi lebih baik. Selain itu, program ini juga bisa membantu meningkatkan ekonomi lokal karena melibatkan petani, UMKM, dan masyarakat sekitar dalam penyediaan makanan.

Selain manfaatnya, ada juga sisi negative atau tantangan dari program ini. Salah satunya adalah biaya yang sangat besar sehingga bisa membebani anggaran Negara jika tidak dikelola dengan baik dan mengurangi anggaran untuk program penting lainnya seperti pendidikan atau infrastruktur. Jika program ini berjalan terus tanpa diimbangi edukasi kemandirian, sebagai masyarakat bisa terbiasa menerima bantuan tanpa berusaha memenuhi kebutuhan gizinya sendiri. Hal ini bisa menghambat upaya membangun kemandirian pangan di tingkat keluarga. Selain itu masalah lain adalah sulitnya menjaga standar kualitas makanan di seluruh daerah. Akibatnya kualitas gizi, rasa, dan kebersihan makanan bisa tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Menurut data ugm.ac.id merilis berita yang berjudul, “Program MBG dinilai Berisiko Pemborosan, Sebaiknya Diprioritaskan pada Anak Keluarga Kurang Mampu.” bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak sekolah. Meskipun berpotensi meningkatkan kinerja siswa serta produktivitas tenaga kerja dalam jangka panjang, program ini masih menuai pro dan kontra terkait besarnya alokasi anggaran awal yang mencapai 71 triliun rupiah. Para ahli mengkhawatirkan adanya pembengkakan biaya yang dapat memicu pemangkasan anggaran pada sektor krusial lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Tantangan di lapangan mencakup pada distribusi logistic yang kompleks serta sulitnya pemantauan standar kualitas nutrisi agar sesuai dengan pedoman gizi yang ditetapkan. Selain itu, menjangkau keluarga mampu yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel melalui pendekatan desentralisasi guna memberdayakan UMKM lokal serta memastikan bantuan lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan (Nugroho, 2025).

Menurut data dpr.go.id merilis berita yang berjudul, “Kasus Keracunan Kembali Muncul, Pengawasan Keamanan MBG Harus Ditinjau.” Bahwa rangkaian kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di berbagai wilayah seperti Grobogan, Mojokerto, dan Pekalongan menjadi peringatan yang serius atas lemahnya pengawasan standar keamanan pangan. Meskipun, program ini memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan status gizi nasional, kasus yang terus berulang menunjukkan bahwa pengawasan dari hulu hingga hilir belum berjalan secara optimal. Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya pengetatan prosedur keamanan pangan, mulai dari pemeriksaan bahan baku yang ketat hingga proses distribusi yang lebih aman bagi para siswa. Audit menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi ekharusan guna memastikan kepatuhan terhadap sertifikasi laik higine sanitasi serta standar operasional yang berlaku. Selain itu, koordinasi lintas lembaga antara BPOM, Badan Gizi Nasional, dan Pemerintah Daerah perlu diperkuat untuk mewujudkan target zero case di masa yang mendatang. Pemerintah juga didesak untuk bersikap transparan terkait hasil

investigasi laboratorium dan memberikan sanksi administrative yang tegas bagi penyedia makanan yang terbukti melakukan kelalaian.

Tantangan implementasi Program MBG sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya mencerminkan adanya konflik kepentingan antaraktor yang terlibat, baik antara pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maupun masyarakat penerima manfaat. Dalam konteks tersebut, konsep resolusi konflik menjadi relevan untuk dipahami sebagai mekanisme penyelesaian ketegangan kepentingan antaraktor demi tercapainya consensus bersama. Sebagaimana dijelaskan oleh (Harto et al., 2026) dalam kajiannya mengenai dinamika koalisi partai politik pada Pemilihan Presiden 2024, resolusi konflik pada dasarnya merupakan proses pencapaian titik temu ketika kepentingan-kepentingan yang semula berbeda dipertemukan melalui negosiasi antaraktor, sehingga menghasilkan kesepakatan bersama yang lebih stabil dan mengurangi potensi fragmentasi. Prinsip serupa dapat diterapkan dalam konteks implementasi kebijakan publik seperti Program MBG, di mana keberlanjutan dan efektivitas program sangat bergantung pada kemampuan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan serta mencapai kesepakatan bersama, alih-alih membiarkan konflik tersebut berlarut sehingga menghambat pencapaian tujuan program secara nasional.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pelaksanaan di lapangan, tetapi juga oleh bagaimana pesan mengenai program ini dikonstruksi dan disampaikan kepada masyarakat. Pemberitaan media, baik yang bernada positif seperti apresiasi masyarakat dan tingginya tingkat kepercayaan publik, maupun yang bernada kritis seperti isu pemborosan anggaran dan kasus keracunan, pada dasarnya merupakan bentuk framing yang berpotensi membentuk persepsi publik secara berbeda-beda terhadap program tersebut. Framing pesan yang tepat dapat mendorong partisipasi aktif dan sense of ownership masyarakat terhadap program, sementara framing yang kurang tepat berisiko menimbulkan resistensi, ketidakpercayaan, bahkan konflik persepsi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana efektivitas pesan framing Program MBG dalam memengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat diketahui strategi komunikasi yang paling efektif guna mendukung keberlanjutan dan keberhasilan program ini secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing untuk mengkaji bagaimana pesan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibingkai oleh media daring baik dalam pemberitaan yang bernada positif maupun kritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana suatu peristiwa dikonstruksi menjadi wacana berita, serta bagaimana konstruksi tersebut berpotensi memengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap program (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan teori framing Robert N. Entman sebagai landasan analisis. (Entman, 1993) menjelaskan bahwa framing adalah proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari suatu realitas oleh media, sehingga aspek tersebut menjadi lebih bermakna, mudah diingat, dan berpengaruh terhadap cara audiens memahami suatu isu. model Entman membagi struktur framing ke dalam empat elemen utama, yaitu Define Problem (pendefinisian masalah), Diagnose Causes (memperkirakan sumber masalah), Make Moral Judgement (membuat keputusan moral), Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian). Objek penelitian ini adalah pemberitaan mengenai Program MBG yang dimuat pada media daring yang dikelompokkan ke dalam dua kategori framing berdasarkan kecenderungan nada pemberitaan:

Tabel 1: Dua Kategori Framing

No	Pemberitaan Pro (DetikNews)	Pemberitaan Kontra
1	"Terbantu Program MBG, Ortu Siswa Berterima Kasih Ke Polda Riau" (Mei, 2025)	"Program MBG dinilai Berisiko Pemborosan, Sebaiknya Diprioritaskan pada Anak Keluarga Kurang Mampu" (Nugroho, 2025)

2	“Survei ISS: 77% Masyarakat Nilai Program MBG Bermanfaat” (Komara, 2025)	“Kasus Keracunan Kembali Muncul, Pengawasan Keamanan MBG Harus Ditinjau” (jdih.dpr.go.id, 2026).
---	--	--

Pemilihan kedua kelompok berita ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya merepresentasikan dua sudut pandang yang berlawanan terhadap Program MBG, satu sisi menonjol keberhasilan dan manfaat program bagi masyarakat, sedangkan sisi lain menyoroti risiko, kelemahan tata kelola, dan dampak negative pelaksanaan program. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari teks berita daring yang dipublikasikan oleh detik.News, ugm.ac.id, dan dpr.go.id terkait Program MBG. Data sekunder diperoleh dari studi literature berupa jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta hasil survey publik (seperti Survei Status Gizi Indonesia, dan Indonesia Social Survey) yang relevan dengan topic penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mencermati teks berita. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan berikut: Familiarisasi Data, Kategorisasi Framing, Komparasi Framing, dan Interpretasi Hasil. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber yaitu membandingkan temuan dari berbagai medi pemberitaan serta mengonfirmasi hasil analisis dengan data sekunder seperti hasil survey dan laporan resmi pemerintah, sehingga interpretasi yang dihasilkan lebih kredibel dan tidak bias pada satu sumber data saja (Bowen, 2009).

PEMBAHASAN

Respons Positif Masyarakat terhadap Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Hasil penelitian pada **berita 1** yang berjudul, “Terbantu Program MBG, Ortu Siswa Berterima Kasih ke Polda Riau” (Mei, 2025) akan dianalisis dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman melalui empat elemen yaitu Define Problem (pendefinisian masalah), Diagnose Causes (memperkirakan sumber masalah), Make Moral Judgement (membuat keputusan moral), Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian).

Define Problem, berita ini mendefinisikan persoalan awal berupa beban ekonomi keluarga dalam menyediakan bekal bergizi bagi anak sekolah yang kemudian diposisikan sebagai masalah yang berhasil diatasi melalui kehadiran Program MBG.

Diagnose Causes, sumber masalah diarahkan pada keterbatasan ekonomi orang tua, khususnya pekerja informal seperti pedagang es dalam memenuhi kebutuhan gizi harian anak.

Make Moral Judgement, program MBG dinilai sebagai bentuk kehadiran Negara yang meringankan beban ekonomi rakyat kecil, sehingga pantas mendapat apresiasi dan rasa terima kasih dari masyarakat.

Treatment Recommendation, penyelesaian ditekankan melalui keberlanjutan distribusi MBG oleh Dapur SPPG Polda Riau kepada 3.129 siswa di enam sekolah dengan harapan program terus berlangsung secara berkelanjutan.

Hasil penelitian pada **berita 2** yang berjudul, “Survei ISS: 77% Masyarakat Nilai Program MBG Bermanfaat” (Komara, 2025) akan dianalisis dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman melalui empat elemen yaitu Define Problem (pendefinisian masalah), Diagnose Causes (memperkirakan sumber masalah), Make Moral Judgement (membuat keputusan moral), Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian).

Define Problem, isu yang diangkat adalah tingkat penerimaan dan kepercayaan publik terhadap Program MBG yang diukur melalui survei nasional Indonesia Social Survey (ISS).

Diagnose Causes, tingginya dukungan publik (77%) dikaitkan dengan manfaat langsung program bagi kebutuhan gizi anak sekolah serta asosiasi kuat program dengan figur Presiden Prabowo Subianto (65,8%).

Make Moral Judgement, MBG dinilai bukan sekadar bantuan makanan, melainkan simbol kehadiran negara yang memberikan rasa aman terkait pemenuhan gizi anak, sehingga layak didukung

secara luas oleh publik.

Framing Risiko Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

Hasil penelitian pada **berita 3** yang berjudul, “Program MBG dinilai Berisiko Pemborosan, Sebaiknya Diprioritaskan pada Anak Keluarga Kurang Mampu” (Nugroho, 2025) akan dianalisis dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman melalui empat elemen yaitu Define Problem (pendefinisian masalah), Diagnose Causes (memperkirakan sumber masalah), Make Moral Judgement (membuat keputusan moral), Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian).

Define Problem, masalah utama yang ditonjolkan adalah risiko pemborosan anggaran negara akibat besarnya alokasi awal MBG yang mencapai Rp 71 triliun, serta ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.

Diagnose Causes, penyebab masalah diidentifikasi pada desain kebijakan yang belum sepenuhnya selektif, sehingga turut menjangkau keluarga mampu yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan tersebut.

Make Moral Judgement, kebijakan dinilai berpotensi mengorbankan sektor krusial lain seperti pendidikan dan kesehatan apabila anggaran tidak dikelola secara efisien dan tepat sasaran.

Treatment Recommendation, direkomendasikan pendekatan desentralisasi yang memberdayakan UMKM lokal serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar bantuan lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan.

Hasil penelitian pada **berita 4** yang berjudul, “Kasus Keracunan Kembali Muncul, Pengawasan Keamanan MBG Harus Ditinjau” (jdih.dpr.go.id, 2026) akan dianalisis dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman melalui empat elemen yaitu Define Problem (pendefinisian masalah), Diagnose Causes (memperkirakan sumber masalah), Make Moral Judgement (membuat keputusan moral), Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian).

Define Problem, masalah yang ditonjolkan adalah rangkaian kasus keracunan massal dalam pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Mojokerto, dan Pekalongan.

Diagnose Causes, sumber masalah diarahkan pada lemahnya pengawasan standar keamanan pangan dari hulu hingga hilir, termasuk pemeriksaan bahan baku dan proses distribusi yang belum optimal.

Make Moral Judgement, kasus yang terus berulang dinilai sebagai kelalaian yang tidak dapat dibiarkan karena menyangkut keselamatan anak-anak, sehingga menuntut pertanggungjawaban penyedia makanan.

Treatment Recommendation, komisi IX DPR RI mendesak audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG, penguatan koordinasi lintas lembaga (BPOM, Badan Gizi Nasional, Pemerintah Daerah), serta sanksi administratif tegas.

Perbandingan keempat berita menunjukkan bahwa struktur framing pro dan kontra memiliki penekanan yang berbeda pada setiap elemen Entman. Pemberitaan pro (detik.News) secara konsisten mendefinisikan MBG sebagai solusi atas persoalan ekonomi dan gizi keluarga dengan penilaian moral yang menonjolkan kehadiran negara sebagai pelindung rakyat. Sebaliknya, pemberitaan kontra (ugm.ac.id dan dpr.go.id) mendefinisikan MBG sebagai kebijakan yang berisiko, baik dari aspek fiskal maupun keamanan pangan dengan penilaian moral yang menuntut akuntabilitas dan perbaikan tata kelola. Dalam perspektif media, perbedaan framing semacam ini merupakan konsekuensi dari orientasi redaksional dan peran media sebagai pengawas kekuasaan (watchdog journalism), di mana media kritis cenderung memosisikan diri sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah (Shoemaker & Reese, 2014).

Define Problem Terhadap Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Define problem atau pendefinisian masalah, merupakan cara media mengidentifikasi dan menentukan suatu peristiwa sebagai masalah tertentu. Pada elemen ini, media memilih sudut pandang tertentu untuk memaknai suatu isu, sehingga peristiwa yang sama dapat dibingkai secara berbeda oleh media yang berbeda misalnya, suatu kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai solusi atas persoalan sosial oleh satu

media, namun didefinisikan sebagai sumber persoalan baru oleh media lain. Elemen ini menjadi titik awal yang menentukan arah keseluruhan narasi berita.

Define Problem dalam Respons Positif Masyarakat Berita Pertama, “Terbantu Program MBG, Orang Tua Siswa Berterima Kasih ke Polda Riau”

Data pertama:

“Kehadiran Program Makanan Bergizi (MBG) mendapat sambutan positif dan dirasakan manfaatnya secara langsung masyarakat” (Mei, 2025).

Berdasarkan naskah berita di atas, masalah yang didefinisikan bukanlah persoalan negative, melainkan persoalan ekonomi keluarga yang berhasil diselesaikan oleh kehadiran Negara melalui Program MBG. Media menempatkan beban biaya bekal harian anak sekolah sebagai isu awal yang kemudian dijawab secara langsung oleh program tersebut. Dengan menghadirkan kesaksian warga seperti Alfasusri sebagai representasi masyarakat penerima manfaat berita ini membingkai MBG bukan sebagai kebijakan abstrak di atas kertas, melainkan sebagai solusi nyata yang menyentuh kehidupan rumah tangga. Pendefinisian masalah semacam ini mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa persoalan gizi dan ekonomi keluarga adalah isu yang layak diperhatikan, dan MBG diposisikan sebagai jawaban yang telah terbukti berhasil di lapangan, sehingga menimbulkan kesan bahwa program ini patut diapresiasi secara luas.

Define Problem dalam Respons Positif Masyarakat Berita Kedua, “Survei ISS: 77% Masyarakat Nilai Program MBG Bermanfaat”

Data kedua:

“77% responden menilai program MBG sangat bermanfaat bagi penerima” (Komara, 2025).

Berita ini mendefinisikan masalah pada tatanan persepsi dan legitimasi publik terhadap Program MBG, bukan pada aspek teknis pelaksanaannya. Isu yang diangkat adalah sejauh mana masyarakat memberikan pengakuan dan kepercayaan terhadap kebijakan tersebut yang diukur secara kuantitatif melalui hasil survey nasional. Dengan menonjolkan angka 77% dan fakta bahwa 65,8% responden mengasosiasikan program dengan sosok Presiden, media mendefinisikan MBG sebagai kebijakan yang telah berhasil memperoleh dukungan mayoritas masyarakat sekaligus menjadi simbol kehadiran Negara. Pendefinisian masalah dalam bentuk data survey ini memperkuat kesan objektivitas dan keabsahan klaim keberhasilan program, sehingga pembaca diarahkan untuk memahami MBG sebagai kebijakan yang secara empiris telah diterima secara positif oleh masyarakat luas.

Define Problem dalam Framing Risiko Berita Ke Tiga, “Program MBG dinilai Berisiko Pemborosan, Sebaiknya Diprioritaskan pada Anak Keluarga Kurang Mampu”

Data ketiga:

“Program ini masih menuai pro dan kontra terkait besarnya alokasi anggaran awal yang mencapai 71 triliun rupiah” (Nugroho, 2025).

Berbeda dari dua berita sebelumnya berita ini mendefinisikan masalah pada aspek fiskal dan ketepatan sasaran kebijakan. Isu utama yang ditonjolkan adalah besarnya anggaran Negara yang dialokasikan untuk MBG serta potensi program tersebut menjangkau kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan. Media memposisikan angka Rp 71 triliun sebagai fakta kunci yang membingkai MBG sebagai kebijakan berisiko secara anggaran, bukan sekadar program bantuan social biasa. Pendefinisian masalah semacam ini menggeser focus pembaca dari manfaat gizi menuju pertanyaan tentang efisiensi dan keadilan distribusi anggaran Negara, sehingga MBG dimaknai sebagai kebijakan yang memerlukan evaluasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan pemborosan.

Define Problem dalam Framing Risiko Berita Ke Empat, “Kasus Keracunan Kembali Muncul, Pengawasan Keamanan MBG Harus Ditinjau”

Data keempat:

“Rangkaian kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di berbagai wilayah seperti Grobogan, Mojokerto, dan Pekalongan” (jdih.dpr.go.id, 2026).

Berita ini mendefinisikan masalah pada aspek keamanan pangan dan keselamatan fisik penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah. Dengan menyebut nama-nama wilayah secara spesifik tempat kasus keracunan terjadi, media membangun kesan bahwa persoalan ini bukan kejadian tunggal melainkan pola berulang yang menunjukkan kelemahan sistematis dalam pengawasan program. Pendefinisian masalah di sini bersifat lebih tajam dibandingkan Berita Ketiga karena menyangkut ancaman langsung terhadap keselamatan anak, bukan sekadar persoalan efisiensi anggaran. Framing semacam ini mengarahkan pembaca untuk memahami MBG sebagai kebijakan yang meskipun bertujuan baik masih memiliki celah serius dalam implementasinya yang harus segera diperbaiki.

Keempat analisis di atas menunjukkan bahwa elemen define problem pada pemberitaan pro (Berita 1 dan 2) cenderung mendefinisikan masalah bukan sebagai kelemahan kebijakan, melainkan sebagai persoalan yang telah berhasil dijawab oleh kehadiran Negara. Bahwa media memiliki kuasa untuk menentukan sisi mana dari suatu realitas yang ditonjolkan agar tampak lebih bermakna bagi audiens; kedua berita ini, sisi yang ditonjolkan adalah keberhasilan program bukan tantangan pelaksanaannya (Entman, 1993). Pola serupa yang membandingkan framing MBG pada Kompas.com dan Kumparan.com, di mana media dengan orientasi afirmatif cenderung mendefinisikan persoalan sebagai sesuatu yang telah “terselesaikan”, sejalan dengan cara Berita Pertama menempatkan kesaksian warga seperti Alfasusri sebagai bukti keberhasilan program di tingkat rumah tangga (Pranandana et al., 2025). Pengalaman langsung dalam penerima manfaat seperti guru, siswa, dan orang tua telah menjadi bukti empiris yang meyakinkan dalam membentuk citra keberhasilan kebijakan di lapangan (Nurulaini & Afifah, 2025).

Pada kedua berita telah menunjukkan angka 77% dukungan publik dan 65,8% asosiasi terhadap sosok Presiden juga sejalan dengan pandangan (Kiftiyah et al., 2025) mengenai MBG dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik yang menegaskan bahwa penerimaan publik terhadap kebijakan redistributif tidak dapat dilepaskan dari legitimasi politik aktor yang mengusungnya, sehingga pendefinisian masalah dalam berita ini sekaligus berfungsi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan.

Sebaliknya, kedua berita kontra secara konsistensi mendefinisikan MBG itu sendiri sebagai persoalan baru yang memerlukan perbaikan. Argumen mengenai risiko pemborosan anggaran pada Berita Ketiga sejalan dengan kajian komparatif (Rassanjani & Rahmi, 2025) menjelaskan tentang kebijakan makan gratis di berbagai Negara yang menegaskan bahwa ketepatan sasaran (targeting) merupakan faktor kunci keberlanjutan fiskal program pangan berskala nasional, sehingga ketika media menyoroti potensi bantuan menjangkau kelompok mampu menyampaikan argumen tersebut dalam basis teoritis yang kuat, bukan sekadar sikap oposisional terhadap Pemerintah. Implementasi kebijakan (Pressman & Wildavsky, 1984) menjelaskan bahwa semakin banyak titik keputusan dalam rantai implementasi, maka semakin banyak risiko penyimpangan antara tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaannya termasuk risiko ketidaktepatan sasaran seperti yang dijelaskan dalam Berita Ketiga. Adapun berita keempat, lemahnya pengawasan keamanan pangan dapat dikatkan dengan mekanisme koordinasi dan monitoring kualitas yang menjadi titik lemah struktural dalam pelaksanaan program berskala nasional.

Pola framing kritis pada kedua berita kontra tersebut menunjukkan bahwa media dengan orientasi investigatif cenderung mendefinisikan masalah kebijakan publik melalui pendekatan problematis yang menunjukkan kesenjangan antara janji kebijakan dan realitas sebenarnya di lapangan, sekaligus menegaskan peran media sebagai watchdog yang mengawal akuntabilitas kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan, perbedaan dalam cara mendefinisikan masalah antara berita yang pro dan kontra menunjukkan bahwa framing berita tidak pernah netral, melainkan dipengaruhi visi redaksi masing-masing (Entman, 1993). Hal ini memperlihatkan adanya benturan kepentingan antar-peran dalam kebijakan publik (Harto

et al., 2026). Dibanding membiarkan persepsi publik makin terbelah, perbedaan ini idealnya dituntaskan melalui komunikasi yang jujur dan terbuka.

Diagnose Causes Terhadap Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Diagnose causes atau memperkirakan sumber masalah, berkaitan dengan bagaimana media mengidentifikasi aktor, faktor, atau kondisi yang dianggap menjadi penyebab dari masalah yang telah didefinisikan sebelumnya (Entman, 1993). Media menentukan pihak mana yang dianggap bertanggung jawab atau menjadi akar penyebab suatu persoalan penentuan ini memengaruhi arah penilaian moral dan rekomendasi penyelesaian yang disampaikan selanjutnya, sebagaimana tercermin dalam struktur tematik pemberitaan yang mengaitkan suatu kebijakan dengan konteks fiskal maupun teknis pelaksanaannya (Maulana & Lukmantoro, 2025).

Diagnose Causes dalam Berita Pertama, “Terbantu Program MBG, Ortu Siswa Berterima Kasih ke Polda Riau”

Topik pada berita pertama memfokuskan pembaca pada identifikasi pihak yang dianggap mengalami persoalan sekaligus pihak yang berperan menyelesaikannya. Dengan demikian, artikel ini memaparkan penjelasan mengenai sumber masalah sebagai berikut:

Data pertama:

“Sumber masalah diarahkan pada keterbatasan ekonomi orang tua, khususnya pekerja informal seperti pedagang es dalam memenuhi kebutuhan gizi harian anak” (Mei, 2025).

Berdasarkan naskah berita di atas, media mengidentifikasi keterbatasan ekonomi keluarga sebagai akar penyebab persoalan gizi anak dengan menghadirkan MBG, seorang pedagang es sebagai representasi kelompok pekerja informal yang rentan secara ekonomi. Media tidak mengarahkan penyebab masalah pada kelalaian pemerintah atau kegagalan sistem, melainkan pada kondisi struktural masyarakat kelas bawah yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi harian anak secara mandiri. Media mengasumsikan bahwa Dapur SPPG Polda Riau berperan sebagai pihak yang berhasil mengintervensi persoalan tersebut, sehingga penentuan sumber masalah pada faktor ekonomi keluarga ini turut mengarahkan penilaian moral berikutnya yakni bahwa kehadiran Negara melalui MBG layak diapresiasi karena telah meringankan beban struktural yang selama ini dihadapi masyarakat kecil.

Diagnose Causes dalam Berita Kedua, “Survei ISS 77%: Masyarakat Nilai Program MBG Bermanfaat”

Berita kedua memfokuskan pembaca pada faktor-faktor yang dianggap menjadi penyebab tingginya tingkat dukungan publik terhadap Program MBG. Artikel ini memaparkan penjelasan sebagai berikut:

Data kedua:

“Tingginya dukungan publik (77%) dikaitkan dengan manfaat langsung program bagi kebutuhan gizi anak sekolah serta asosiasi kuat program dengan figure Presiden Prabowo Subianto (65,8%)” (Komara, 2025).

Berdasarkan berita di atas, media mengidentifikasi dua faktor sekaligus sebagai sumber tingginya penerima publik yaitu manfaat riil program bagi pemenuhan gizi anak dan kedekatan asosiatif program dengan figure kepala Negara. Media tidak menempatkan penyebab persoalan pada kelemahan kebijakan, melainkan pada faktor keberhasilan yang bersifat ganda: aspek substantif (manfaat gizi) dan aspek simbolik-politik (figure Presiden). Dalam topik artikel ini, media mengasumsikan bahwa tingginya angka dukungan publik bukan kebetulan, melainkan hasil dari kombinasi antara dampak nyata program dan legitimasi tokoh yang mengusungnya, sehingga penentuan sumber masalah semacam ini mengarahkan penilaian moral berikutnya bahwa MBG layak dipandang sebagai simbol kehadiran Negara yang sah dan patut didukung secara luas.

Diagnose Causes dalam Berita Ketiga, “Program MBG dinilai Berisiko Pemborosan, Sebaiknya Diprioritaskan pada Anak Keluarga Kurang Mampu”

Berita ketiga memfokuskan pembaca pada identifikasi pihak yang dianggap tanggung jawab atas risiko pemborosan anggaran MBG. Artikel ini memaparkan penjelasan sebagai berikut:

Data ketiga:

“Penyebab masalah diidentifikasi pada desain kebijakan yang belum sepenuhnya selektif, sehingga turut menjangkau keluarga mampu yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan tersebut” (Nugroho, 2025).

Berdasarkan berita di atas, media mengarahkan sumber masalah bukan pada individu atau kelompok masyarakat tertentu, melainkan pada desain kebijakan itu sendiri yang dinilai belum memiliki mekanisme penargetan (targeting) yang tepat. Media menempatkan pihak perumus kebijakan sebagai actor yang bertanggung jawab atas ketidaktepatan sasaran ini, sebagaimana tercermin dalam struktur tematik pemberitaan yang mengaitkan MBG dengan konteks fiskal dan teknis pelaksanaannya (Maulana & Lukmantoro, 2025). Hal ini mengasumsikan bahwa persoalan pemborosan anggaran bersumber dari lemahnya seleksi penerima manfaat sejak tahap perencanaan, sehingga penentuan sumber masalah ini mengarahkan penilaian moral berikutnya bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengorbankan sektor krusial lain apabila tidak segera diperbaiki desainnya.

Diagnose Causes dalam Berita Keempat, “Kasus Keracunan Kembali Muncul, Pengawasan Keamanan MBG Harus Ditinjau”

Berita keempat memfokuskan pembaca pada identifikasi pihak yang dianggap lalai dalam menjaga keamanan pangan program MBG. Artikel ini memaparkan penjelasan sebagai berikut:

Data keempat:

“Sumber masalah diarahkan pada lemahnya pengawasan standar keamanan pangan dari hulu hingga hilir, termasuk pemeriksaan bahan baku dan proses distribusi yang belum optimal” (jdih.dpr.go.id, 2026).

Berdasarkan berita di atas, media menilai akar masalahnya ada pada lemahnya sistem pengawasan dari hilir ke hulu mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga distribusi makanan ke sekolah, sehingga secara implisit menunjuk penyedia makanan dan pengawas SPPG sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas berulangnya kasus keracunan. Melalui sudut pandang tersebut, media sebenarnya mengasumsikan bahwa kasus keracunan bukan disebabkan oleh kegagalan konsep kebijakan Makan Bergizi Gizi (MBG) secara keseluruhan, melainkan murni kelemahan teknis di lapangan. Hal ini sejalan dengan struktur tematik pemberitaan yang menghubungkan kebijakan dengan konteks teknis pelaksanaannya (Maulana & Lukmantoro, 2025). Pada akhirnya, penunjukan celah pengawasan sebagai sumber masalah menggiring penilaian moral bahwa kasus tersebut adalah bentuk kelalaian serius yang tidak bisa ditoleransi karena menyangkut keselamatan anak-anak.

Keempat analisis di atas menegaskan bahwa media tidak sekadar melaporkan fakta secara netral, melainkan aktif menentukan siapa yang layak disalahkan dan dipuji. Berbeda dengan isu pengawasan tadi, berita pertama dan kedua justru mengarahkan masalah pada kondisi struktural masyarakat seperti keterbatasan ekonomi keluarga pekerja informal dan kebutuhan akan pengakuan publik terhadap program Negara yang dinilai berhasil diatasi lewat MBG. Pola ini menegaskan pandangan (Entman, 1993) bahwa elemen diagnose causes, di mana penentuan penyebab masalah digunakan untuk menunjuk siapa yang bertanggung jawab. Dalam kedua berita yang cenderung pro tersebut, tanggung jawab justru dibebankan pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat itu sendiri bukan pemerintah sehingga MBG secara implisit diposisikan sebagai ‘penyelamat’ yang patut diapresiasi.

Sebaliknya, pada berita ketiga dan keempat, media mengarahkan sumber masalah pada kelemahan desain kebijakan dan lemahnya sistem pengawasan implementasi yakni ketidaktepatan sasaran anggaran serta minimnya standar keamanan pangan dari hulu ke hilir. Media dengan orientasi investigative cenderung mengaitkan persoalan kebijakan publik dengan konteks fiskal dan teknis pelaksanaan, sehingga tanggung jawab kegagalan diarahkan pada penyelenggara kebijakan bukan pada faktor eksternal seperti

kondisi ekonomi masyarakat (Maulana & Lukmantoro, 2025). Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada rangkaian keputusan dan koordinasi antaraktor pelaksana, sehingga semakin banyak titik keputusan dalam rantai implementasi semakin besar pula ruang bagi media untuk mengidentifikasi kelemahan structural sebagai sumber masalah utama.

Secara keseluruhan, perbedaan penentuan sumber masalah pada keempat berita ini membuktikan bahwa diagnose causes bukan sekadar deskripsi objektif atas suatu peristiwa, melainkan pilihan strategis media yang menentukan arah penilaian moral dan rekomendasi penyelesaian selanjutnya. Ketika sumber masalah diarahkan pada kondisi masyarakat, penilaian moral cenderung mengarah pada apresiasi terhadap kehadiran Negara; sementara ketika sumber masalah diarahkan pada kelemahan kebijakan, penilaian moral cenderung mengarah pada tuntutan akuntabilitas dan perbaikan tata kelola. Instrumen analitis yang efektif untuk membedakan bagaimana media membentuk opini publik terhadap kebijakan social yang kompleks seperti Program MBG, sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik (Entman, 1993).

Make Moral Judgement Terhadap Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Make moral judgement tau membuat keputusan moral adalah proses media memberikan penilaian atau evaluasi moral terhadap actor dan penyebab masalah yang telah diidentifikasi (Entman, 1993). Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menyisipkan penilaian mengenai benar atau salah, layak atau tidak layak, serta baik atau buruknya suatu tindakan maupun kebijakan. Penilaian moral ini disampaikan melalui pemilihan diksi, kutipan narasumber, maupun struktur retorika tertentu, sehingga secara tidak langsung membentuk sikap pembaca terhadap isu yang diberitakan (Pan & Kosicki, 1993).

Make Moral Judgement dalam Berita Pertama, “Terbantu Program MBG, Ortu Siswa Berterima Kasih ke Polda Riau”

Berita pertama memfokuskan pembaca pada penilaian moral positif terhadap kehadiran Negara melalui Program MBG. Dengan demikian, artikel ini memaparkan evaluasi moral sebagai berikut:

Data pertama:

“Program MBG dinilai sebagai bentuk kehadiran Negara yang meringankan beban ekonomi rakyat kecil, sehingga pantas mendapat apresiasi dan rasa terima kasih dari masyarakat” (Mei, 2025).

Berdasarkan berita di atas, media menyisipkan penilaian moral bahwa tindakan Negara menghadirkan MBG merupakan langkah yang benar dan layak diapresiasi bukan sekadar kewajiban administratif belaka. Penilaian moral ini disampaikan melalui pemilihan diksi seperti “berterima kasih” pada judul berita serta penampilan kutipan langsung dari warga penerima manfaat sehingga secara tidak langsung membentuk sikap pembaca untuk turut memandang MBG sebagai kebijakan yang secara etis pantas didukung (Pan & Kosicki, 1993). Dalam topik artikel ini, media mengasumsikan bahwa relasi antara Negara dan rakyat kecil bersifat protektif, di mana kehadiran Negara melalui program bantuan gizi dipandang sebagai bentuk keberpihakan yang secara moral patut dihargai oleh masyarakat luas.

Make Moral Judgement dalam Berita Kedua, “Survei ISS: 77% Masyarakat Nilai Program MBG Bermanfaat”

Berita kedua memfokuskan pembaca pada legitimasi moral MBG sebagai simbol kehadiran Negara. Artikel ini memaparkan evaluasi moral sebagai berikut:

“MBG dinilai bukan sekadar bantuan makanan, melainkan simbol kehadiran Negara yang memberikan rasa aman terkait pemenuhan gizi anak, sehingga layak didukung secara luas oleh publik” (Komara, 2025).

Berdasarkan berita di atas, media ingin menunjukkan bahwa program MBG bukan hanya soal bagi-bagi makanan gratis melainkan bukti nyata kehadiran Negara dalam memperhatikan masa depan anak-anak. Hal ini dapat meyakinkan pembaca karena media menyajikan informasinya lewat data angka dan survey yang terasa lebih objektif (Pan & Kosicki, 1993). Dalam artikel ini, media mengasumsikan bahwa

dukungan mayoritas publik secara otomatis mencerminkan kebenaran dan kelayakan moral suatu kebijakan, sehingga MBG diposisikan sebagai program yang secara etis pantas mendapat dukungan luas dari seluruh elemen masyarakat.

Make Moral Judgement dalam Berita Ketiga, “Program MBG dinilai Berisiko Pemborosan, Sebaiknya Diprioritaskan pada Anak Keluarga Kurang Mampu”

Berita ketiga memfokuskan pembaca pada penilaian moral kritis terhadap pengelolaan anggaran MBG. Artikel ini memaparkan evaluasi moral sebagai berikut:

Data ketiga:

“Kebijakan dinilai berpotensi mengorbankan sektor krusial lain seperti pendidikan dan kesehatan apabila anggaran tidak dikelola secara efisien dan tepat sasaran” (Nugroho, 2025).

Berdasarkan dari artikel ketiga ini, media mengajak pembaca untuk melihat sisi etis dan moral di balik pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Media menekankan bahwa pengalokasian dana secara serampangan merupakan langkah yang secara etis tidak bisa dibenarkan. Pasalnya, jika anggaran tidak dikelola secara efisien dan tepat sasaran, kebijakan ini berpotensi menguras kas Negara dan mengorbankan sektor-sektor lain yang tidak kalah krusial bagi masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan (Nugroho, 2025).

Secara terselubung, media membangun cara pandang kritis tersebut melalui penggunaan kata-kata kunci yang bernada peringatan seperti “berisiko” dan mengorbankan”. Pemilihan diksi ini merupakan strategi retorik untuk mempengaruhi emosi dan membentuk sikap pembaca agar tidak menelan bulat-bulat pada kebijakan pemerintah (Pan & Kosicki, 1993). Melalui narasi berita yang dibangun, media membimbing pembaca untuk melihat bahwa ada harga mahal yang harus dibayar jika suatu kebijakan dijalankan tanpa perhitungan yang matang.

Pada akhirnya, topik pemberitaan tersebut diangkat dari asumsi bahwa keadilan dan ketepatan distribusi uang rakyat merupakan prinsip moral yang jauh lebih utama daripada sekadar mengejar target jumlah penerima manfaat yang luas. Media ingin menegaskan bahwa sebuah program pemerintah tidak bisa dicap sukses hanya karena berhasil membagikan bantuan ke banyak orang, melainkan harus memenuhi standar etika pengelolaan kebijakan publik yang bijak, seimbang, dan bertanggung jawab.

Make Moral Judgement dalam Berita Keempat, “Kasus Keracunan Kembali Muncul, Pengawasan Keamanan MBG Harus Ditinjau”

Berita keempat memfokuskan pembaca pada penilaian moral tegas terhadap kelalaian dalam pengawasan keamanan pangan MBG. Artikel ini memaparkan evaluasi moral sebagai berikut:

Data keempat:

“Kasus yang terus berulang dinilai sebagai kelalaian yang tidak dapat dibiarkan karena menyangkut keselamatan anak-anak, sehingga menuntut pertanggungjawaban penyedia makanan” (jdih.dpr.go.id, 2026).

Berdasarkan pada berita keempat tersebut, media menyampaikan nada kritik yang paling keras dengan menyoroti bahwa hal ini sengaja dirancang untuk mengarahkan pandangan pembaca bahwa ada pelanggaran etika berat terkait perlindungan anak di dalam pelaksanaan program MBG (Pan & Kosicki, 1993). Melalui pembingkaiannya tersebut, media ingin menegaskan bahwa keselamatan fisik anak-anak adalah prinsip moral utama yang posisinya berada di atas segalanya. Dalam pandangan media, alasan keterbatasan teknis di lapangan maupun kerumitan efisiensi program tidak boleh dijadikan pemakluman atas terancamnya kesehatan anak. Pada akhirnya, pemberitaan tersebut secara tidak langsung menuntut agar penanggung jawab kebijakan mengambil tindakan tegas dan tidak lagi memandang kasus keracunan ini sebagai angin lalu.

Berdasarkan dari keempat berita tersebut membuktikan bahwa penetapan moral judgement oleh media berbanding lurus dengan efektivitas pembentukan persepsi publik terhadap keberhasilan maupun

urgensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada berita pertama dan kedua, evaluasi moral yang positif melalui diksi rasa syukur dan legitimasi data statistik secara langsung mengontruksi persepsi masyarakat bahwa MBG merupakan kewajiban moral Negara yang berhasil dipenuhi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Scheufele & Tewksbury, 2016) pembingkai bernada afirmatif (gain framing) terbukti efektif memicu priming effect yaitu mengondisikan persepsi publik agar melihat suatu kebijakan dari sisi manfaat utamanya. Dampak terhadap partisipasi masyarakat sangat signifikan: ketika publik mempercayai legitimasi moral program tersebut, tingkat penerimaan (public acceptance) dan partisipasi aktif warga dalam mendukung keberlanjutan program di tingkat lokal akan meningkatkan secara alami.

Sebaliknya, pada berita ketiga dan keempat, efektivitas framing media bekerja melalui penguatan narasi kritis yang menguji pada tingkat partisipasi dan kewaspadaan (civic vigilance) masyarakat. Berita ketiga mengonstruksi penilaian moral bahwa pemborosan anggaran adalah bentuk ketidakadilan sosial, sedangkan berita keempat menetapkan keselamatan anak sebagai standar moral tertinggi yang tak boleh dilanggar. Pembingkai ancaman dan risiko (loss framing), menurut (Pan & Kosicki, 1993) efektif menggeser persepsi publik dari penonton pasif menjadi pengawas aktif. Dalam konteks partisipasi, moral judgement yang tajam ini tidak mematikan dukungan masyarakat terhadap MBG secara keseluruhan, melainkan mendorong partisipasi partisipatif dalam bentuk control social agar pemerintah dan penyedia jasa lebih akuntabel dalam menjalankan kebijakan.

Secara keseluruhan, efektivitas pesan framing MBG dalam mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat sangat bergantung pada bagaimana media menyeimbangkan aspek apresiasi dan kritik moral dalam narasinya. Ketika media memosisikan MBG sebagai ‘penyelamat’, persepsi yang terbentuk adalah ketidakpercayaan yang bermuara pada partisipasi kolaboratif masyarakat; sebaliknya, ketika media menyoroti kelalalian teknis dan anggaran, persepsi yang terbentuk adalah ketidakpercayaan kritis (critical distrust) yang memicu partisipasi pengawasan. Tata kelola komunikasi publik oleh (Maulana & Lukmantoro, 2025) perbedaan orientasi moral dalam pemberitaan media ini membuktikan bahwa framing bukan sekadar strategi bahasa, melainkan instrument komunikasi politik yang menentukan apakah masyarakat akan berpartisipasi sebagai pendukung kebijakan yang patuh atau sebagai pengawas kebijakan yang kritis.

Treatment Recommendation terhadap Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Treatment recommendation atau menekankan penyelesaian, merupakan bagian akhir dari struktur framing yang berisi rekomendasi atau solusi yang ditawarkan media atas masalah yang telah dibingkai sebelumnya (Entman, 1993). Elemen ini menunjukkan arah kebijakan atau tindakan yang seharusnya diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik berupa rekomendasi bagi pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat secara umum.

Treatment Recommendation dalam Berita Pertama, “Terbaru Program MBG, Ortu Siswa Berterima Kasih ke Polda Riau”

Berita pertama memfokuskan pembaca pada rekomendasi keberlanjutan distribusi program sebagai bentuk penyelesaian atas persoalan yang telah dibingkai sebelumnya. Artikel ini memaparkan rekomendasi sebagai berikut:

Data pertama:

“Penyelesaian ditekankan melalui keberlanjutan distribusi MBG oleh Dapur SPPG Polda Riau kepada 3129 siswa di enam sekolah dengan harapan program terus berlangsung secara berkelanjutan” (Pranandana et al., 2025).

Berdasarkan berita tersebut, solusi yang ditawarkan media adalah mempertahankan dan memperluas jangkauan program tanpa mengubah sistem dasarnya. Pendekatan ini terbukti efektif membentuk persepsi positif masyarakat karena penonjolan angka penerima manfaat berhasil meyakinkan publik bahwa program sudah berjalan baik. Namun, gaya penyampaian pesan semacam ini juga membawa dampak

tersendiri terhadap pola partisipasi warga di lapangan. Ketika media terus menekankan keberhasilan program, masyarakat cenderung terdorong untuk bersikap pasif dan sekadar menjadi penerima bantuan yang apresiatif. Alhasil, framing seperti ini berisiko menepikan peran aktif warga dalam mengawasi pelaksanaan program agar berjalan lebih akuntabel (Nurulaini & Afifah, 2025).

Treatment Recommendation dalam Berita Kedua, “Survei ISS: 77% Masyarakat Nilai Program MBG Bermanfaat”

Berita kedua memfokuskan pembaca pada rekomendasi konsistensi pelaksanaan program berdasarkan hasil survey. Artikel ini memaparkan rekomendasi sebagai berikut:

Data kedua:

“Direktur penelitian ISS menyarankan agar program ini dilaksanakan secara konsisten, menjaga kualitas makanan, dan dihubungkan dengan kebijakan lain yang mendukung ekonomi keluarga” (Komara, 2025).

Berbeda dari berita pertama, rekomendasi dalam berita ini terasa lebih strategi karena menghubungkan program MBG dengan integrasi kebijakan ekonomi yang lebih luas. Melalui framing berbasis data survey ini, media secara efektif membentuk persepsi publik bahwa MBG bukan sekadar bantuan pangan sesaat, melainkan investasi jangka panjang yang terpercaya dan valid. Keberhasilan membangun pandangan positif tersebut membuktikan sejauh mana pesan yang dikemas secara terstruktur mampu memengaruhi tingkat keyakinan masyarakat terhadap suatu program pemerintah. Lebih jauh lagi, keterpaparan publik pada hasil survey mayoritas tersebut mampu memicu partisipasi warga untuk berani menyuarakan dukungan secara kolektif di ruang publik. Pada akhirnya, masyarakat terdorong untuk terlibat aktif bukan hanya sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai bagian dari kelompok besar yang turut memvalidasi keberhasilan kebijakan tersebut (Kiftiyah et al., 2025).

Treatment Recommendation dalam Berita Ketiga, “Program MBG dinilai Berisiko Pemborosan, Sebaiknya Diprioritaskan pada Anak Keluarga Kurang Mampu”

Berita ketiga memfokuskan pembaca pada rekomendasi perbaikan tata kelola anggaran dan sasaran program. Artikel ini memaparkan rekomendasi sebagai berikut:

Data ketiga:

“Direkomendasikan pendekatan desentralisasi yang memberdayakan UMKM lokal serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar bantuan lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan” (Nugroho, 2025).

Berdasarkan berita di atas, rekomendasi ini bersifat korektif menuntut perubahan structural pada desain kebijakan. Dalam kaitannya dengan efektivitas pesan framing, rekomendasi semacam ini berpotensi menggeser persepsi publik dari optimism menuju sikap kritis-evaluatif karena masyarakat diajak untuk mempertanyakan efisiensi kebijakan alih-alih menerimanya secara pasif. Terhadap partisipasi masyarakat, rekomendasi desentralisasi dan pelibatan UMKM lokal justru membuka ruang keterlibatan aktif dalam rantai penyediaan pangan sehingga framing kritis tersebut alih-alih melemahkan dukungan dapat mendorong bentuk partisipasi yang lebih substantive berupa pengawasan bersama terhadap ketepatan sasaran program (Rassanjani & Rahmi, 2025).

Treatment Recommendation dalam Berita Keempat, “Kasus Keracunan Kembali Muncul, Pengawasan Keamanan MBG Harus Ditinjau”

Berita keempat memfokuskan pembaca pada rekomendasi penguatan pengawasan dan penegakan sanksi. Artikel ini memaparkan rekomendasi sebagai berikut:

Data keempat:

“Komisi IX DPR RI mendesak audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG, penguatan koordinasi lintas lembaga (BPOM, Badan Gizi Nasional, Pemerintah Daerah) serta sanksi administrative tegas” (jdih.dpr.go.id, 2026).

Berdasarkan berita di atas, rekomendasi ini merupakan yang paling tegas diantara keempat berita, karena secara eksplisit menuntut audit dan sanksi institusional. Dalam kaitannya dengan efektivitas pesan framing, rekomendasi semacam ini berisiko menurunkan persepsi kepercayaan publik dalam jangka pendek, namun berpotensi memperkuat kepercayaan jangka panjang apabila rekomendasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti secara transparan. Terhadap partisipasi masyarakat, framing yang menuntut akuntabilitas kelembagaan ini dapat mendorong orang tua siswa dan masyarakat sipil untuk lebih aktif mengawasi kualitas dan keamanan pangan MBG di lingkungan sekolah masing-masing, sejalan dengan pentingnya mekanisme koordinasi dan monitoring kualitas dalam implementasi kebijakan publik (Suprpto et al., 2025).

Pengintegrasian tersebut memperkuat bahwa hal ini mengarah pada bagaimana inovasi berbasis data, self-assessment, akuntabilitas digital, serta transisi masyarakat/ aparaturnya menuju pengawasan aktif berhubungan langsung dengan teori efektivitas dan tipologi inovasi publik (Afisa et al., 2023). Jenis treatment recommendation dalam keempat berita memperlihatkan bahwa arah penyelesaian masalah yang ditawarkan media berbanding lurus dengan pembentukan persepsi publik mengenai efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada berita pertama dan kedua, rekomendasi berfokus pada keberlanjutan distribusi dan konsistensi pelaksanaan berbasis data survey. Penonjolan angka penerima manfaat serta integrasi program dengan kebijakan ekonomi makro terbukti efektif membangun persepsi bahwa MBG adalah program yang sukses, valid, dan pantas dipertahankan. Pembingkai afirmatif tersebut mengondisikan masyarakat untuk mempercayai kapasitas pemerintah. Namun, konsekuensi terhadap partisipasi masyarakat cenderung bersifat pasif-konsumtif, di mana warga sekadar diposisikan sebagai penerima bantuan yang memberikan validasi social (affirmative compliance) tanpa terdorong untuk terlibat dalam pengawasan tata kelola program di Lapangan (Nurulaini & Afifah, 2025).

Sebaliknya, pada berita ketiga dan keempat, media menawarkan rekomendasi yang bersifat korektif dan instruktif yakni pengetatan alokasi anggaran, desentralisasi pasokan melalui UMKM, audit menyeluruh, hingga penjatuhan sanksi institusional. Framing rekomendasi yang bernada kritis ini secara efektif menggeser persepsi publik dari optimism pasif menjadi kewaspadaan kritis (critical alertness). Dari aspek partisipasi masyarakat, alih-alih menurunkan dukungan secara permanen, tuntutan perubahan structural tersebut justru memicu partisipasi publik yang lebih substantive. Sebagaimana ditunjukkan dalam studi partisipasi kebijakan publik dan tata kelola digital, keterbukaan informasi serta pemanfaatan data yang akurat dapat mendorong transisi masyarakat dari penerima pasif menjadi pengawas aktif guna memastikan transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan program (Afisa et al., 2023). Hal ini mendorong orang tua murid, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat sipil untuk bertransisi dari penonton menjadi pengawas aktif guna memastikan transparansi dan keselamatan anak (Suprpto et al., 2025).

Secara keseluruhan, efektivitas rekomendasi solusi dalam memengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat membuktikan bahwa media tidak hanya mengarahkan “apa yang harus dipikirkan” publik tentang MBG, tetapi “apa yang harus dilakukan” oleh warga. Ketika rekomendasi media bermuara pada apresiasi dan pembukaan akses, persepsi yang terbangun adalah legitimasi politik yang menghasilkan partisipasi berbasis dukungan massif. Namun, ketika rekomendasi menekankan akuntabilitas, audit, dan perbaikan mekanisme sebagaimana pentingnya inovasi sistemik dan partisipatif dalam tatakelola publik modern (Afisa et al., 2023). Persepsi publik bergeser pada tuntutan transparansi yang memicu partisipasi berbasis pengawasan. Perbedaan respons partisipatif ini menegaskan kerangka (Entman, 1993) bahwa treatment recommendation merupakan jenis komunikatif yang paling krusial dalam menentukan apakah masyarakat akan merespons kebijakan publik sebagai objek penerima yang pasif atau sebagai subjek pengawas yang aktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari artikel ini menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibingkai secara berbeda oleh media pro (detik.News) dan media kontra (ugm.ac.id dan

dpr.go.id) melalui keempat elemen framing Robert N. Entman. Pada elemen define problem, media pro mendefinisikan MBG sebagai solusi yang berhasil menjawab persoalan ekonomi keluarga dan legitimasi kebijakan publik, sedangkan media kontra mendefinisikan bahwa MBG sumber persoalan baru dalam aspek fiskal dan keamanan pangan. Perbedaan ini berlanjut secara konsisten pada elemen diagnose causes, di mana media pro mengarahkan sumber masalah pada kondisi struktural masyarakat yang berhasil diatasi oleh kehadiran Negara, sementara media kontra mengarahkan sumber masalah pada kelemahan desain kebijakan dan lemahnya sistem pengawasan implementasi. Temuan ini menegaskan framing bukanlah representasi netral atas realitas, melainkan hasil dari pilihan sudut pandang redaksional yang secara aktif membentuk konstruksi sosial mengenai suatu kebijakan publik.

Pada elemen Make Moral Judgement dan Treatment Recommendation, artikel ini menemukan pola yang konsisten dengan efek priming, di mana pembingkaiannya afirmatif pada berita pro efektif membentuk persepsi publik yang berorientasi pada apresiasi dan kepercayaan terhadap legitimasi moral Negara, sementara pembingkaiannya ancaman pada berita kontra efektif menggeser persepsi publik ke arah kewaspadaan kritis. Implikasi kedua pola framing tersebut terhadap partisipasi masyarakat juga berbeda secara mendasar: framing pro cenderung mendorong partisipasi yang bersifat pasif-konsumtif yakni masyarakat sekadar berperan sebagai penerima manfaat yang memberikan validasi sosial tanpa dorongan untuk mengawasi jalannya kebijakan, sedangkan framing kontra justru mendorong partisipasi yang lebih substansial berupa pengawasan sosial terhadap akuntabilitas dan ketepatan sasaran program. Dengan demikian, efektivitas pesan framing MBG tidak dapat dinilai hanya dari sisi seberapa besar dukungan publik yang berhasil dibentuk. Melainkan juga dari sejauh mana pesan tersebut mampu menggerakkan bentuk keterlibatan masyarakat yang konstruktif bagi keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak semata ditentukan oleh aspek teknis pelaksanaan di lapangan, tetapi juga oleh bagaimana media mengonstruksi dan menyeimbangkan narasi keberhasilan dan tantangan program kepada publik. Ketegangan antara framing pro dan kontra pada dasarnya mencerminkan konflik kepentingan antaraktor dalam implementasi kebijakan publik yang idealnya diarahkan menuju titik temu melalui komunikasi kebijakan yang transparan dan konsisten, bukan dibiarkan menjadi polarisasi persepsi yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Pemerintah, media, dan masyarakat perlu membangun pemahaman bersama bahwa kritik terhadap MBG bukan bentuk penolakan terhadap program, melainkan mekanisme pengawasan yang justru memperkuat akuntabilitas dan keberlanjutan kebijakan gizi nasional.

REFERENSI

- Afisa, A., Suswanta, S., & Zaenuri, M. (2023). Merit System Innovation Through The Sipinter Application (Information System For Self-Assessment Of Merit System Implementation) In Indonesia. *Jis: Jurnal Ilmu Sosial*, 22(2), 50–66. <https://doi.org/10.14710/Jis.22.2.2023.50-66>
- Astuti, E. E. L. (2019). Gambaran Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan Di Desa Karang Sari Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 [Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta]. [https://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2334/3/Bab 2-Dikonversi.Pdf](https://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2334/3/Bab%20Dikonversi.Pdf)
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis As A Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/Qrj0902027>
- Bpmpprovsumut.kemendikdasmen.go.id. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (Mbg): Menyongsong Indonesia Emas 2045. <https://bpmpprovsumut.kemendikdasmen.go.id/Program-Makan-Bergizi-Gratis-Mbg-Menyongsong-Indonesia-Emas-2045/>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification Of A Fractured Paradigm. *Journal Of Commun*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/J.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Harto, U. S., Diniyanto, A., Baqil, Y., Death, C., & Muyassaroh, I. S. (2026). Conflict Resolution Of Political Parties In The Coalition Nominating Presidential/Vice Presidential Candidates In

- Indonesia In 2024. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 17(1), 157–186.
<https://Jsp.Umy.Ac.Id/Index.Php/Jsp/Article/View/503/301>
- Jdih.Dpr.Go.Id. (2026). Kasus Keracunan Kembali Muncul, Pengawasan Keamanan Mbg Harus Ditinjau. *Jdih.Dpr.Go.Id.*
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Dalam Perspektif Keadilan Sosial Dan Dinamika Sosial – Politik. *Pancasila Jurnal Keindonesian*, 5(1). <https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.52738/Pjk.V5i1.726>
- Komara, I. (2025). Survei Iss: 77% Masyarakat Nilai Program Mbg Bermanfaat. *Detiknews*.
<https://News.Detik.Com/Berita/D-8072680/Survei-Iss-77-Masyarakat-Nilai-Program-Mbg-Bermanfaat>
- Maulana, H., & Lukmantoro, T. (2025). Framing Tempo.Co Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (Mbg): Analisis Model Pan & Kosicki Pada Isu Pemangkasan Anggaran. *Interaksi Online*, 13(3).
<https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Interaksi-Online/Article/View/52446/34036>
- Mei, A. R. (2025). Terbantu Program Mbg, Ortu Siswa Berterima Kasih Ke Polda Riau. *News.Detik.Com*. <https://News.Detik.Com/Melindungi-Tuah-Marwah/D-8185788/Terbantu-Program-Mbg-Ortu-Siswa-Berterima-Kasih-Ke-Polda-Riau>
- Muhawarman, A. (2025). Ssgi 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%. *Kemkes.Go.Id*. <https://Kemkes.Go.Id/Id/Ssgi-2024-Prevalensi-Stunting-Nasional-Turun-Menjadi-198>
- Nugroho, A. (2025). Program Mbg Dinilai Berisiko Pemborosan, Sebaiknya Diprioritaskan Pada Anak Keluarga Kurang Mampu. *Ugm.Ac.Id*. <https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/Program-Mbg-Dinilai-Berisiko-Pemborosan-Sebaiknya-Diprioritaskan-Pada-Anak-Keluarga-Kurang-Mampu/>
- Nurulaini, R., & Afifah, D. F. (2025). Implementasi Program Mbg Untuk Meningkatkan Gizi Anak Sekolah Dasar Di Kota Semarang 2025. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 5(11).
<https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.59188/Jurnalsostech.V5i11.32520>
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing Analysis: An Approach To News Discourse. *Political Communication*, 10(1), 55–75. <https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1080/10584609.1993.9962963>
- Pranandana, V. A. K., Haryanti, N., & Meifilina, A. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Pada Media Online Kompas.Com Dan Kumparan.Com. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(9). <https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62281/T7gs9540>
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations In Washington Are Dashed In Oakland: Or, Why It's Amazing That Federal Programs Work At All, This Being A Saga Of The Economic Development Administration As Told By Two Sympathetic Observers Who Seek To Build Morals*. University Of California Press.
- Rassanjani, S., & Rahmi, I. (2025). Free Schoolmeals Policy: Lessons Learned From Around The World For Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 24(1), 1–28.
<https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.14710/Jis.24.1.2025.1-28>
- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2016). Framing, Agenda Setting, And Priming: The Evolution Of Three Media Effects Models. *Journal Of Communication*, 57(1), 9–20.
<https://Fbaum.Unc.Edu/Teaching/Articles/J-Communication-2007-1.Pdf>
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2014). *Mediating The Message In The 21st Century: A Media Sociology Perspective* (3rd Ed.).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*. Alfabeta.
- Suprpto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). A Policy Implementation Review Of The Free Nutritious Meal (Mbg) Program. *Jisdep: The Journal Of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6(2). <https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.46456/Jisdep.V6i2.798>